

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Umum

Kota Bengkulu terletak diposisi pesisir pantai Samudera Indonesia (pantai barat pulau Sumatera) yang berada pada antara 101°01 sampai dengan 103°46 Bujur Timur dan 02°16 sampai dengan 05°31 Lintang Selatan, dengan luas 14,452 Km atau 14,452 Ha dengan luas laut 387,6 Km.

1. Adapun batas-batas Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

- Sebalah Utara berbatasan dengan Bengkulu Utara
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Seluma
- Sebalah Timur berbatasan dengan Bengkulu Utara
- Sebalah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

2. Suhu dan kelembaban

Suhu yang ada di Kota Bengkulu rata-rata antara 21° C hingga 31° C. Sedangkan lama penyinaran matahari berkisar antara 40% hingga 80% dan kelembaban udara 80-97%.

3. Curah hujan

- Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret
- Musim kemarau terjadi antara bulan April hingga September
- Dan musim paling basah itu terjadi pada bulan Desember hingga Januari

4. Wilayah

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 14,452 Km atau 14,452 Ha dengan memiliki 67 kelurahan yang tersebar diseluruh Kota Bengkulu. Untuk lihat lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

TABEL V
Wilayah Provinsi Bengkulu

| WILAYAH | LUAS | LURAH |
|------------------|------------------|--------------|
| Gading cempaka | - | 5 |
| Teluk segara | 315 | 13 |
| Selebar | 5425 | 6 |
| Muara bangkahulu | 2396 | 7 |
| Kampung melayu | 2108 | 6 |
| Ratu agung | 1095 | 8 |
| Ratu samban | 284 | 9 |
| Sungai serut | 1353 | 7 |
| Singgaran pati | - | 6 |
| JUMLAH | 14,452 Km | 67 |

Sumber : Dinsos Kota Bengkulu, tahun 2012

Berdasarkan dokumentasi Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2012, secara geografis Dinas Sosial Kota Bengkulu terletak di jalan LetJend. Santoso Pasar Melintang, Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Visi dan misi Dinas Sosial Kota Bengkulu, telah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bengkulu
4. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu

4.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bengkulu

Sebagai salah satu sektor pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, sangat berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaannya harus memiliki pedoman dan arah yang jelas, yang tergambar dalam visi dan misi. Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial Kota Bengkulu dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilandasi oleh:

- **Visi**

Terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang baik dan manusiawi dalam mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

- **Misi**

Misi pembangunan kesejahteraan sosial Kota Bengkulu adalah:

- a) Mewujudkan pemberian layanan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar mereka dapat hidup layak di masyarakat

- b) Mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan bidang kesejahteraan sosial
- c) Meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas masing-masing
- d) Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama bidang kesejahteraan sosial dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta

4.3 Tupoksi Dinas Sosial Kota Bengkulu

Berdasarkan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Bengkulu, maka tugas pokok Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah : *“Dinas Sosial Kota Bengkulu melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan Dinas atau tugas lainnya yang diberikan Walikota”*. Sedangkan fungsi Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Sosial Kota Bengkulu, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengumpulkan serta pengolahan data, penyusunan rencana dan program, kegiatan dana APBD, APBN, serta bantuan luar negeri dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dilingkungan Dinas disatuan kerja Dinas Sosial Kota Bengkulu, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- c. Seksi Pelaporan

3. Bidang Rehabilitasi

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi bina sosial (gelandangan, gepeng, tuna susila, penyandang gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak. Bidang ini terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- b. Seksi Tuna Susila
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Dinas dibidang Kesejahteraan Sosial meliputi penyuluhan sosial, pembinaan karang taruna, dan organisasi sosial, urusan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan, serta pembinaan kesejahteraan/ pemberdayaan sosial dan penjaminan kesejahteraan sosial. Bidang ini meliputi:

- a. Seksi Penyuluhan Sosial, Karang Taruna dan Organisasi Sosial
 - b. Seksi Urusan Keperintisan, Kepeloporan dan Kepahlawanan
 - c. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Bantuan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, koordinasi, bimbingan teknis serta evaluasi bantuan bidang sosial korban bencana alam dan bencana sosial, sumbangan sosial masyarakat serta undian sosial. Bidang ini meliputi:

- a. Seksi Bantuan Bencana
- b. Seksi Sumbangan dan Undian Sosial
- c. Seksi Bantuan Sosial

4.4 Keadaan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bengkulu, maka pada tahun 2012 mempunyai pegawai sebanyak 36 orang yang terdiri dari 32 orang PNS dan 4 orang pegawai honor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

4.4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada tahun 2012 jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu sebanyak 32 orang PNS dan 4 orang tenaga honor. Akan lebih jelas lihat tabel berikut:

TABEL VI**Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No | Golongan | Jumlah | Persentase |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1 | IIA | - | - |
| 2 | IIB | 1 | 3,12% |
| 3 | IIC | 2 | 6,25% |
| 4 | IID | - | - |
| 5 | IIIA | 5 | 15,62% |
| 6 | IIIB | 5 | 15,62% |
| 7 | IIIC | 4 | 12,5% |
| 8 | IIID | 9 | 28,12% |
| 9 | IVA | 4 | 12,5% |
| 10 | IVB | 2 | 6,25% |
| 11 | IVC | - | - |
| 12 | IVD | - | - |
| 13 | IVE | - | - |
| | JUMLAH | 32 | 100% |

Sumber: Dokumen Dinsos Kota Bengkulu, Desember 2012

Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai di Dinas Sosial Kota Bengkulu kebanyakan bergolongan IIID yaitu sebanyak 9 orang atau 28,12%, IIIA dan IIIB masing-masing berjumlah 5

orang atau masing-masing 15,62%. Dengan jumlah keseluruhan 32 orang yang berstatus pegawai negeri dan 4 orang honorer.

TABEL VII

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 14 | 18 | 32 |
| Persentase | 43,75% | 56,25% | 100% |

Sumber: Dokumen Dinsos Kota Bengkulu, Desember 2012

Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai di Dinas Sosial Kota Bengkulu kebanyakan terdiri dari perempuan yaitu 18 orang perempuan dan 14 orang laki-laki, atau 56,25% perempuan dan 43,75% laki-laki dengan jumlah seluruh pegawai adalah 32 orang.

4.4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Bengkulu masih terbilang bervariasi, mulai dari tamatan SLTA hingga S2. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VIII

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1 | SD | - | - |
| 2 | SLTP | - | - |
| 3 | SLTA | 6 | 18,75% |
| 4 | D1 | - | - |
| 5 | DII | - | - |
| 6 | DIII | 1 | 3,12% |
| 7 | DIV | 3 | 9,37% |
| 8 | S1 | 21 | 65,62% |
| 9 | S2 | 1 | 3,12% |
| 10 | S3 | - | - |
| | JUMLAH | 32 | 100% |

Sumber: Dokumen Dinsos Kota Bengkulu, Desember 2012

Pada hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah tamatan sarjana. Hanya 6 orang yang tamatan SLTA atau sekitar 18,75%, dan

sisanya adalah tamatan sarjana. Pegawai tamatan diploma berjumlah 4 orang, yang terbanyak adalah tamatan pendidikan S1 yang berjumlah 21 orang atau 65,62%, dan pegawai yang sudah mencapai pendidikan S2 hanya 1 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Informan

Untuk menggali dan menyari data yang berkaitan dengan Implementasi Program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) terhadap Anak Jalanan dan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bengkulu dan berdasarkan metode penelitian yang dipakai maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa staf dan pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu yang secara langsung terlibat didalam kegiatan pelaksanaan program PMKS.

Secara keseluruhan, para informan yang dipilih adalah mereka yang berkecimpung ataupun yang ikut melaksanakan kegiatan program yang diteliti serta memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi. Adapun identitas informan berdasarkan kelompok umur.

Identitas informan berdasarkan kelompok umur adalah mereka yang dalam usia produktif yaitu 20-50 tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IX

Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur

| No | Kelompok Umur | Angka | Persentase |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1. | 21-30 | 1 | 12,5% |
| 2. | 31-40 | 5 | 62,5% |
| 3. | 41-50 | 2 | 25% |
| | Jumlah | 8 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian Juni 2013

Dari tabel VIII di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar informan berumur 31-40 tahun, sebanyak 4 orang (50 %). sedangkan 41-50 tahun sebanyak 2 orang (25 %), dan 20-30 tahun sebanyak 2 orang (25 %). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan adalah mereka yang dalam usia produktif artinya mereka mengerti apa yang ditanyakan kepada mereka ini sudah mampu berpikir dengan baik dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu masalah serta memiliki waktu dan wawasan dan memahami materi yang ingin ditanyakan kepada mereka. Maka dengan alasan itulah peneliti memilih responden dengan usia yang produktif.

Dan berikut merupakan karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin:

TABEL X

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Angka | Persentase |
|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 3 | 37,5% |
| 2 | Perempuan | 5 | 62,5% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian Juni 2013

Data diatas menunjukkan informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang atau 37,5%, dan sedangkan perempuan berjumlah 5 orang atau setara dengan 62,5%.

Selain kelompok umur yang dapat mempengaruhi pemberian informasi, jenis tingkat pendidikan juga mempengaruhi pengetahuan informan. Dan dibawah ini merupakan karakteristik informan berdasarkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel IX dibawah ini sebagai berikut ini:

TABEL XI

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Angka | Persentase |
|---------------|------------|----------|-------------|
| 1. | S2 | 1 | 12,5% |
| 2. | S1 | 6 | 75% |
| 3. | SLTA | 1 | 12,5% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian Juni 2013

Berdasarkan tingkat pendidikan secara umum para informan merupakan berpendidikan Strata 1 berjumlah 6 Orang (75 %), sedangkan tamatan SLTA berjumlah 1 orang (12,5 %) dan terakhir tamanatan S2 berjumlah 1orang (12,5 %). Berdasarkan informasi yang diperoleh secara umum para informan memiliki pengetahuan dan pola pikir yang cukup baik sehingga dapat memberikan jawaban yang logis dan relevan.

5.2 Implementasi Program Layanan PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Dasar hukum dari program PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada anak jalanan dan anak terlantar adalah UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 12 yang menyatakan bahawa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

a) Tujuan Program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar

Tujuan program tersebut adalah terbangunnya sistem layanan kesejahteraan sosial yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan upaya perlindungan, melalui keterlibatan masyarakat, dan pengembangan kemampuan lembaga-lembaga pelayanan, sehingga anak dapat menikmati kehidupan yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

b) Sasaran Pencapaian Program

- Menurunnya jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mengalami permasalahan
- Meningkatnya jumlah dan kemampuan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam memberikan pelayanan pada anak yang membutuhkan
- Meningkatnya keterlibatan, peran, dan kontribusi masyarakat dalam dukungan penyelenggaraan program PMKS
- Meningkatnya keterlibatan, peran, dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendukung Program PMKS secara berkelanjutan
- Menguatnya sistem perlindungan dan rehabilitasi anak

c) Indikator pencapaian program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar

Berdasarkan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan oleh program diatas tersebut, maka keberhasilan program dapat dilihat dari:

- Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan yang dapat mengakses layanan pemenuhan kebutuhan dasar (nutrisi, kesehatan, pendidikan dan sanitasi)
- Besarnya penurunan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mengalami permasalahan sosial yang tidak tertangani
- Jumlah dan sebaran lembaga anak yang mendapatkan dukungan peningkatan kemampuan dan dinilai mampu dalam memberikan layanan pada anak yang membutuhkan
- Jumlah dan sebaran sistem layanan rujukan yang berhasil dibangun dan berfungsi untuk penanganan masalah anak jalanan dan anak terlantar

Dibawah ini adalah program layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu:

1. Layanan dukungan keluarga
 - Bimbingan dan pengembangan pengasuhan
 - Penguatan ekonomi keluarga
2. Layanan kebutuhan dasar anak
 - Pemberian bantuan materi
3. Layanan kesiapan belajar dan pelatihan ketrampilan
 - Layanan pemantapan belajar
 - Layanan pengembangan ketrampilan dan skill

Program Layanan PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu yang ada diatas diantara 3 layanan tersebut yang pada saat ini masih diterapkan hanyalah Layanan Kebutuhan Dasar Anak yaitu pemberian bantuan materi. Penyebab hanya 1 jenis layanan saja yang dilaksanakan karena tidak memadainya dana untuk pelaksanaannya.

Keterbatasan dana seharusnya tidak menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab, seperti layanan pemantapan belajar bisa dilakukan tanpa harus memiliki ataupun menunggu anggaran dari APBD. Misalnya dengan cara belajar membaca dan menulis hanya diperlukan tenaga pengajar, dan sedangkan tenaga pengajar tidak perlu harus menggunakan guru atau sebagainya, bisa juga menggunakan jasa dari panitia pelaksana program begitupun seperti layanan pengembangan keterampilan dan skill serta layanan dukungan keluarga.

5.3 Hasil Penelitian

Dibawah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi terhadap penerima layanan program yaitu anak jalanan dan anak terlantar Simpang Lima Kota Bengkulu.

| Organisasi Pelaksanaan Program | |
|---------------------------------------|--|
| Pembagian Tugas | <i>“Pelaksana PMKS adalah Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dinas Sosial Provinsi mengkoordinasikan Dinas Sosial Kota/Kabupaten dalam pelaksanaannya. Pembagian tugas kami dilakukan oleh bagian Bidang Perencanaan. Itu saja”.</i> |
| | <i>“Pembagian tugas sebelumnya calon panitia diberikan pelatihan sebelum terjun kelapangan. Setelah itu panitia yang sudah diberikan pelatihan diberikan tugas masing-masing berdasarkan hasil sertifikasi pelatihan tadi. Tujuan pelatihan tadi agar mengetahui kualifikasi dan kompetensi panitia pelaksana sebagai pekerja sosial”.</i> |
| | <i>“Pembagian tugas dilakukan berdasarkan skill dan keahlian bidangnya masing-masing. Pemilihan pekerja atau pemberian tugas berdasarkan Seleksi dan Sertifikasi Pekerja Sosial Perlindungan Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pemantapan. Sertifikasi dilakukan untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dibidangnya masing-masing”.</i> |
| | <i>“Pembagian tugas melalui seleksi yang ketat dan panitia yang terpilih sudah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi agar kita bisa menentukan kualitas individu tersebut berdasarkan tugas dan wewenang yang akan dipegangnya”</i> |
| Desentralisasi Wewenang | <i>“Wewenang penuh dari program ini berada pada Dinas kita sendiri yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu”.</i> |
| | <i>“Dinas Sosial Kota Bengkulu”.</i> |
| | <i>“Wewenang penuh Dinas Sosial Kota Bengkulu”.</i> |

Dibawah ini adalah hasil wawancara dengan panitia pelaksanaan program tentang interpretasi program, sebagai berikut:

| Interpretasi Program | |
|-------------------------------|---|
| Pemahaman | <i>“PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini diadakan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar kedepannya dapat terjamin. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan atas Undang-undang tadi dan juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan ada juga disini menyangkut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.</i> |
| | <i>“PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini adalah program yang ditujukan untuk anak agar dapat menikmati kehidupan yang layak, baik dan sejahtera serta untuk tumbuh dan berkembang secara optimal”.</i> |
| Tanggapan dan Dukungan | <i>“Baik”.</i> |
| | <i>“Ada, terkadang dari masyarakat atau relawan dan LSM”</i> |
| | <i>“Baik”.</i> <i>“Ada, seperti Dinas Perlindungan Anak itu”</i> |

Hasil wawancara tentang penerapan program yang terdiri dari sosialisasi program dan monitoring dan evaluasi. Disini peneliti juga melakukan wawancara terhadap penerima layanan program.

| Penerepan Program | |
|--------------------------------|---|
| Sosialisasi Program | <i>“Kalau soal prosesnya dilapangan saya kurang tahu dikarenakan saya jarang ikut kelapangan”</i> |
| | <i>“Tidak pernah kalau sekarang, tapi kalau dulu pernah dikasih makanan sama uang”</i> <i>“Hanya dikasih tau supaya kami tidak minta-minta lagi, kalau tidak kami akan ditangkap polisi kata orang Dinas Sosial”</i> |
| Monitoring dan Evaluasi | <i>“Disini pengawasan atau monitoringnya dilakukan dilapangan, lalu dibuat laporan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing tim koordinasi. Kesalahan itu pasti ada, paling kita hanya mengkoreksi ulang lalu memberi teguran kepada individu atau tim yang melakukan kesalahan”.</i> |

| | |
|--|---|
| | <p><i>“Pelaporan dan monitoring dilakukan berdasarkan pemabgian wewenang masing-masing tim. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seksi monitoring dan evaluasi sendiri. Kadang hanya diberi teguran saja bila ada yang salah lalu dibenarkan secepatnya. Biasanya laporan itu selesainya kurang lebih 2 bulan”.</i></p> |
|--|---|

5.4 Pembahasan

5.4.1 Organisasi Pelaksanaan Program

Menyangkut masalah organisasi, keberhasilan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar tergantung pada kapasitas struktur administrasi untuk melasanakan dalam setiap bidangn kegiatan. Organisasi sebagai wadah dan proses menentukan sekali dalam rangka pencapaian tujuan program. Tingginya kemampuan organisasi memberi harapan besar untuk mengimplementasikan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar secara efektif.

a) Pembagian Tugas

Dalam pelaksanaan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar, secara umum sudah berjalan dengan baik dan sistematis seperti pembagian tugas yang jelas, melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi di bidang masing-masing. Disini dibuktikan oleh jawaban dari responden 3.

“dengan melalui Seleksi dan Sertivikasi Pekerja Sosial Perlindungan Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pemantapan. Sertifikasi dilakukan untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dibidangnya masing-masing. Jadi pembagian tugasnya jelas berdasarkan skill masing-masing individu”.

Hal senada juga disampaikan oleh responden 4 tentang pembagian tugas terhadap program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar ini.

“pembagian tugas dilakukan berdasarkan skill dan keahlian bidangnya masing-masing. Pemilihan pekerja atau pemberian tugas berdasarkan Seleksi dan Sertifikasi Pekerja Sosial Perlindungan Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pemantapan. Sertifikasi dilakukan untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dibidangnya masing-masing”.

Dibawah ini merupakan pemaparan dari responden 6 yang ikut menjelaskan tentang bagaimana cara pembagian tugas dalam pelaksanaan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar.

“pembagian tugas melalui seleksi yang ketat dan panitia yang terpilih sudah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi agar kita bisa menentukan kualitas individu tersebut berdasarkan tugas dan wewenang yang akan dipegangnya”

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses maupun hasil kerjanya. Sementara itu, kompetensi dilakukan agar sumber daya manusia mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan tanggung jawab.

Proses dari tahap ini adalah sebagai berikut:

Pembagian tugas melalui beberapa seleksi dan beberapa kriteria. Sebelum melakukan seleksi, adapun proses dan kriteria pekerja sosial antara lain:

1. Calon pekerja sosial ini berlatar belakang berpendidikan dan mempunyai pengalaman dalam penanganan anak jalanan
2. Berusia maksimal 40 tahun
3. Mampu bekerja dengan berbagai tim, mulai dari kalangan instansi, masyarakat, LSM ataupun relawan
4. Diutamakan mampu mengolah data dengan komputer

5. Tidak terikat kontrak kerja (bagi relawan dan masyarakat) dengan organisasi, lembaga, atau instansi lain selain Program PMKS yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pendamping PMKS anak jalanan dan anak terlantar.
6. Seleksi tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan panitia pelaksanaan program

Hasil wawancara diatas menggambarkan bagaimana pihak Dinas Sosial melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan pematapan pekerja sosial agar tercipta peningkatan pelayanan sosial anak dimasyarakat. Setiap organisasi baik di organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, menginginkan sumber daya manusia yang dmilikinya dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi organisasi. Namun Seleksi dan Sertifikasi Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pematapan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu seperti yang diungkapkan diatas tadi, biasanya mengandung konsekuensi waktu dan biaya yang perlu disediakan. Namun hal tersebut disini benar-benar diharapkan akan memberikan manfaat berupa peningkatan terhadap sumber daya manusianya dan berdampak pula pada organisasi serta dalam pelaksanaan program PMKS.

Pembagian tugas yang teratur, terinci dan sistematis memerlukan masukan dalam bentuk tersedianya kapasitas sumber daya manusia, baik sebagai individu maupun sebagai tim. Kapabilitas sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi. Dan dengan masukan yang baik akan menciptakan keluaran atau output yang baik pula pada program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar.

b) Desentralisasi Wewenang

Desentralisasi wewenang yang dimaksud dalam program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar adalah penyerahan kewenangan dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini kewenangan penuh dipegang oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu itu sendiri, sebagaimana dipaparkan oleh responden 2.

“wewenang penuh yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu karena yang mengadakan dan melaksanakannya kan Dinas Sosial, maka wewenang ya jelas dipegang oleh Kadis”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh responden 5 dan 1 yaitu sebagai berikut:

“Dinas Sosial Kota Bengkulu. Karena program PMKS ini adalah program instansi atau program Dinas”.

“wewenang penuh dari program ini berada pada Dinas kita sendiri yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu”.

Dengan pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa wewenang berada ditangan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Wewenang tersebut bukan hanya dipergunakan untuk memimpin, akan tetapi wewenang didalam sini adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut seperti membangun sasaran umum berdasarkan tujuan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar ini berdasarkan pada tujuan program, perencanaan, serta membantu semua program layanan PMKS tersebut yang menjadi bidang tanggung jawabnya, meninjau kembali semua konsep rencana oleh masing-masing bidang atau masing-masing pelayan sosial anak dan hal tersebut termasuk target waktu penyelesaian atau pelaksanaan program, mengembangkan metode monitoring yang harus digunakan untuk memastikan kemajuan berkelanjutan.

Akan lebih baik lagi jika wewenang yang dimiliki oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu tersebut harus sesekali dipertimbangkan apakah terdapat cukup kewenangan untuk menjalankan program yang tepat sasaran yaitu sebagai pelayan sosial anak dimasyarakat didalam program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar.

5.4.2 Interpretasi Terhadap Program

Persepsi sebagai proses kognitif yang diperlukan oleh seseorang untuk menafsirkan mencakup penafsiran objek, tanda, dan dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Interpretasi terhadap program mempengaruhi keefektifan implementasinya, dalam segala permasalahannya pihak yang terlibat dalam implementasi program harus tahu apa yang seharusnya dilakukan. Pemahaman secara tepat terhadap program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar diperlukan untuk mampu menginterpretasikan secara tepat, akibatnya pelaksanaan program akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memberlakukan implementasi program tersebut.

Alat yang tepat yang dipergunakan untuk hal tersebut adalah komunikasi. Melalui komunikasi yang baik akan dapat mempengaruhi terhadap sikap para pelaksana program PMKS, yang mana bahwa efektifitas implementasi program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar bukan hanya para implementor mengetahui apa yang akan dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk itu, tetapi para implementor juga harus berkeinginan melaksanakan kebijakan tersebut.

a) Pemahaman Terhadap Program

Persepsi tentang program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) terhadap Anak Jalanan dan Anak Terlantar berbeda-beda dan cukup beragam interpretasi antara yang

satu dengan yang lain akan tetapi pada dasarnya pendapat tersebut adalah sama pengertiannya, seperti responden 8, yaitu,

“PMKS anak jalanan dan anak terlantar itu adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada pada anak jalanan dan anak terlantar. Tujuannya agar anak jalanan dan anak terlantar ini dapat menikmati kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang dengan baik”.

Selain itu juga ada yang berpendapat sangat singkat seperti responden 5, yaitu,

“PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini bertujuan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar dapat terjamin.

Penjelasan dari responden 1 dan 3 juga dapat dilihat bahwa pemahaman terhadap program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar juga dapat diserap dengan sempurna.

“Program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar itu lebih tepatnya disebut PKSA atau penyandang kesejahteraan sosial anak. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, bermain seperti anak biasanya. PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini bertujuan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar dapat terjamin sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu bermain, berkembang dan tumbuh sebagaimana anak-anak lainnya. Nah peran tersebut dapat dilakukan mulai dari keluarga, kerabat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat”.

Pemahaman dari program tersebut juga dibuktikan oleh penjelasan dari responden 3.

“PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini adalah program yang tujuannya terbangunnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan upaya perlindungan, melalui penguatan kemampuan keluarga dalam memenuhi hak anak, mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga anak dapat menikmati kehidupan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya”.

Hampir semua jawaban responden adalah sama, hanya perkataan, dan penyampaiannya saja yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara kepada 8 orang responden ini adalah memiliki jawaban yang hampir sama, dengan kata lain pemahaman mereka terhadap program tersebut sudah dapat terbilang memahami.

Pemahaman terhadap program mempengaruhi keefektifan implementasinya, dalam segala permasalahannya pihak yang terlibat dalam implementasi program harus tahu apa yang seharusnya dilakukan. Pemahaman secara tepat terhadap program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar diperlukan untuk mampu menginterpretasikan secara tepat, akibatnya pelaksanaan program akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memberlakukan implementasi program tersebut. Alat yang tepat yang dipergunakan untuk hal tersebut adalah komunikasi.

Apabila panitia pelaksanaan program Layanan PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar ini jelas memahami tentang apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran mereka, maka sangat jelas akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program. Dan hasil wawancara di atas menunjukkan pemahaman panitia pelaksana program PMKS Anak Jalanan Dan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu yang sudah baik sehingga dapat meletakkan harapan berjalannya program tersebut dengan baik pula.

b) Tanggapan dan Dukungan Terhadap Program

Tanggapan dan dukungan pada dasarnya adalah merupakan ketersediaan sumber daya yang memberikan bantuan yang didapat lewat moril maupun non moril oleh orang lain ataupun organisasi dan lembaga-lembaga dan juga merupakan anggota dalam suatu kelompok yang berdasarkan kepentingan bersama.

Tanggapan dan dukungan dari intern belum sepenuhnya menanggapi dengan baik dikarenakan masih ada yang malas melaksanakan program tersebut. Seperti jawaban dari responden 6, yaitu,

“ada yang menanggapi dengan baik ada juga yang tidak. Nah yang tidak ini bukannya tidak mengerti, tetapi terkadang malas terlibat dalam pelaksanaan program”.

Tanggapan, pemahaman dan dukungan masih sangat kurang dengan dibuktikannya oleh penjelasan dari responden 7 yaitu:

“kalau saya pribadi sih kurang, karena kegiatan ini tidak menghasilkan uang tapi malah menghabiskan APBN kita, sedangkan anak jalanan dan anak terlantar tidak habis-habis”.

Dukungan dari luar Dinas Sosial Kota Bengkulu sangat baik. Dibuktikan dengan jawaban semua responden adalah baik. Terutama dukungan dari Dinas Perlindungan Anak, LSM, bahkan ada dukungan yang baik dari sukarelawan.

Seharusnya tanggapan dan dukungan itu lebih baik dimulai dari dalam organisasi itu sendiri terlebih dahulu yaitu panitia pelaksana dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Dan sebagai pendukung adalah dari luar. Dukungan dari luar atau dari instansi terkait sangat berpengaruh besar terhadap keefektifitasan program karena dapat menciptakan pemberian informasi, saran dan umpan balik tentang situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pelaksanaan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar. Jika halnya yang terjadi seperti pendapat dari para responden diatas maka jelas saja jika terkadang dukungan dari masyarakat atau sukarelawan hanya sedikit

5.4.3 Penerapan Program

Masalah yang paling penting dalam penerapan Program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaga. Ini mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang

pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dikerjakan yaitu Program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Dimensi ini menunjukkan bahwa implementasi program membutuhkan daya, pikiran dan waktu yang lama, mungkin jauh berbeda dari dugaan para penyusun program. Implementasi bukan sekedar perkiraan hipotesisi dari orang – orang yang memperhitungkan dan merencanakan.

a) Sosialisasi Program

Pelaksanaan program dilapangan dilakukan setelah panitia terbentuk. Tetapi tidak semua panitia mengetahui bagaimana mekanisme dilapangan karena setiap panitia ada tugasnya masing-masing. Ada yang didalam dan ada yang diluar atau dilapangan.

Seperti yang disampaikan oleh responden nomor 1 dan 2,

“kalau soal prosesnya dilapangan saya kurang tahu dikarenakan saya jarang ikut kelapangan”.

“pelaksanaan dilapangan sudah ada tugasnya masing-masing”.

Pernyataan dari responden 8 ini cukup membantu dalam mengetahui mekanisme pelaksanaan program.

“kita mulai dari tahapan pertama yaitu:

- 1. Penyusunan manual dan instrumen meliputi pedoman, prosedur dan kriteria*
- 2. Pengumpulan data*
- 3. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran, kegiatan ini melalui rapat kerja*
- 4. Penentuan panitia dan pembagian tugas, dimulai dari pemberian pelatihan dan seleksi, sertifikasi yang didapat digunakan untuk menentukan kualifikasi yang sesuai dibidang penyelenggaraan*
- 5. Pelaksanaan dilapangan seperti penyuluhan dukungan keluarga, pembinaan, dan bantuan sosial*
- 6. Supervisi, monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan berjalan lancar”*

Pernyataan dari responden 6 juga menjelaskan secara singkat bagaimana cara pelaksanaan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar dilapangan.

“pelaksanaan dilapangan sejauh kami telah melaksanakan kegiatan ini ya lancar-lancar saja. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, mulai dari survei, observasi, mengumpulkan data melalui panitia, LSM, dan relawan. Data tersebut dikumpulkan lalu dibukukan. Setelah itu menyerahkan data ke Kemensos dan memulai pelaksanaan dilapangan. Dengan cara penertiban, pemulangan kepada keluarga, dan peberian bantuan. Dan yang terakhir monitoring dan pelaporan”.

Tetapi dalam implementasi belum banyak program yang dapat direalisasikan karena minimnya dana. Dan juga kenyataan yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan proses-proses yang sudah diatur atau direncanakan untuk program tersebut. Itu dapat dilihat dengan hanya satu program saja yang dilakukan pada saat ini yaitu melakukan penertiban dan memeberi bantuan materi.

Selain itu kenyataan atas apa yang direncanakan dan apa yang telah dipaparkan oleh pegawai Dinas Sosial Kota adalah berbeda pada kenyataannya, yaitu seperti penerimaan bantuan yakni anak jalanan dan anak terlantar sama sekali tidak menerima bantuan apapun selain dirazia dan dibawa ke Dinas Sosial hanya untuk diberi nasehat. Berikut adalah jawaban dari penerima layanan (anak jalanan dan anak terlantar):

Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

“Tidak pernah kalau sekarang, tapi kalau dulu pernah dikasih makanan sama uang”

Lalu kalian diberikan apa sekarang di Dinas Sosial?

“Hanya dikasih tau supaya kami tidak minta-minta lagi, kalau tidak kami akan ditangkap polisi kata orang Dinas Sosial”

Hal senada juga disampaikan oleh seorang anak jalanan di daerah Simpang Lima Kota Bengkulu yang sebagai penerima layanan.

Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

“tidak pernah, tapi pernah dikasih nasi sama uang”

Lalu kalian diberikan apa sekarang di Dinas Sosial?

“cuma ceramah, jangan minta-minta lagi”

Proses dari tahap ini adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan sosialisasi program, adapun prosesnya antara lain:

1. Setelah pembagian tugas melalui seleksi dan sertifikasi selesai, Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kota Bengkulu membuat SK untuk panitia pendata PMKS berupa SPT (Surat Perintah Tugas)
2. Melibatkan sukarelawan, LSM, dan Ormas
3. Pendata diberikan kuisioner dan pendataan PMKS dilakukan di 67 kelurahan Kota Bengkulu
4. Kegiatan dilapangan tersebut di danai oleh APBD
5. Data yang ditemukan dilapangan diberikan ke Bidang Resos untuk diverifikasi kembali
6. Kemudian mengajukan anggaran dan data yang valid diajukan ke Kemensos
7. Lalu memulai sosialisasi program berdasarkan layanan yang telah ditetapkan dengan melibatkan anggota Satpol PP, Pemerintah Daerah dan beberapa lembaga lainnya
8. Pemberian bantuan sosial

Pernyataan diatas merupakan hasil wawancara penulis terhadap penerima layanan atau anak jalanan. Pernyataan diatas sudah terlihat jelas bahwa sosialisasi terhadap program pada saat ini sama sekali tidak berjalan selain hanya sebatas penertiban. Jika dibandingkan dengan dasar hukum dari program PMKS yaitu UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar

warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Maka sangat berbanding terbalik dengan apa yang mendasari program tersebut. Ditambah lagi dengan menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Tetapi kenyataannya anak jalanan tersebut belum maksimal menerima layanan program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar serta belum tercapainya tujuan program dan makna dari “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”.

b) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran

- Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan
- Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. /Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)

- Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian
- Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok kperbandingan
- Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu

- Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana dilakukan oleh Seksi Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Sebagaimana organisasi-organisasi melakukan pengawasan dan pelaporan. Monitoring dilakukan dengan cara umum seperti yang diungkapkan oleh responden 7, yaitu,

“Monitoring dilakukan secara umum, seperti mencatat, memantau, menyelesaikan masalah ketika pelaksanaan”.

Hal hampir seupa juga disampaikan oleh responden 8,

“Monitoring dilakukan dengan cara mencatat, memantau, menyelesaikan masalah. Jika ada kesalahan hanya diberikan teguran dan diwajibkan memperbaiki”.

Hal yang hampir serupa disampaikan oleh responden 1 yaitu:

“disini pengawasan atau monitoringnya dilakukan dilapangan, lalu dibuat laporan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing tim koordinasi. Kesalahan itu pasti ada, paling kita hanya mengkoreksi ulang lalu memberi teguran kepada individu atau tim yang melakukan kesalahan”.

Pendapat dari responden 2 pun tidak jauh beda denga pendapat diatas.

“pelaporan dan monitoring dilakukan berdasarkan pemabgian wewenang masing-masing tim. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seksi monitoring dan evaluasi sendiri. Kadang hanya diberi teguran saja bila ada yang salah lalu dibenarkan secepatnya. Biasanya laporan itu selesainya kurang lebih 2 bulan”.

Sistem evaluasi juga sudah memenuhi standart yaitu dengan cara masing-masing sub bagian diwajibkan menyerahkan laporan kegiatan yang berisikan pelaksanaan dilapangan, ketepatan sasaran, waktu distribusi, jumlah bantuan, target fungsional, dokumentasi progres, ketepatan penggunaan alokasi dana dan penyelesaian masalah ada kesalahan.

Rencana dilaksanakan dan monitoring melakukan pengukuran atas progres atau kemajuan yang diperoleh untuk mencapai kemajuan. Penilaian dan peninjauan kembali

dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat penyimpangan terhadap rencana.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai dengan kriteria tepat waktu distribusi, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tercapainya target fungsional. Komunikasi perlu dibangun dimana dialog antar pemegang wewenang yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan panitia pelaksanaan Program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar serta timnya berlangsung secara berkelanjutan untuk merumuskan harapan dan berbagi informasi tentang tujuan dari program. Maka dari itu jika monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik maka tidak mungkin pula program PMKS Anak Jalanan dan Anak Terlantar ini dapat terlaksana dan tepat sasaran.

Dari semua hasil diatas, terdapat perbedaan yang sangat menonjol dari apa yang dikatakan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam tata cara pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu memang sudah cukup baik, akan tetapi prakteknya dilapangan terhadap penerima atau tujuan dari program tersebut tidaklah sesuai dengan rencana. Disini juga dapat dilihat bahwa Dinas Sosial melakukan pelaksanaan program yang sudah terencana dengan baik, tetapi tidak sepenuhnya dilakukan dengan kata lain sistem pelaksanaan dilapangan, sosialisasi program, dan pengawasan yang masih sangat tidak baik. Jika saja pengawasan terhadap pelaksanaan program itu baik, maka tidak akan mungkin pula program tersebut akan berjalan dengan baik pula sesuai dengan tujuan utama program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar. Jangan hanya dipereencanaan saja yang baik, teratur dan sistematis, tetapi penerapannya juga harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program, tepat sasaran dan benar-benar dilakukan.

Ketepatan sasaran dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini diukur dari:

1. Berkurangnya jumlah anak jalanan
2. Meningkatnya jumlah anak yang kembali dan diterima oleh keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial
3. Dan meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar yang dapat mengakses layanan PMKS

Dan berikut ini adalah hasil wawancara dengan responden 1:

“Jika ditanyakan sudah tercapai atau belum itu susah, karena pelaksanaan program kami ini berhasil tetapi jumlah anak jalanan terkadang selalu bertambah. Terkadang juga mereka datang dari luar kota lalu menjadi anak jalanan disini. Jadi anak jalanan ini gak habis-habis”.

Dari hasil diatas maka dapat kita lihat bahwa program PMKS ini sudah dijalankan semaksimal mungkin, akan tetapi jumlah anak jalanan yang ada di Simpang Lima Kota Bengkulu bukannya berkurang melainkan bertambah yang disebabkan pemberian layanan dasar yang berupa materi (uang, pakaian dan makanan) menyebabkan meningkatnya jumlah anak jalanan. Peningkatan ini dilakukan oleh anak jalanan dan anak terlantar dengan cara komunikasi dari satu anak jalanan ke anak jalanan lainnya.

Manajemen yang baik, dapat menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Dalam pelaksanaan program PMKS terhadap Anak Jalanan dan Anak terlantar ini, sebuah manajemen pelaksanaan sangat penting guna menuju kesuksesan. Manajemen dalam pelaksanaan program PMKS meliputi:

1. Organisasi pelaksanaan, dan didalamnya terdapat pembagian tugas, desentralisasi wewenang

2. Interpretasi program yang meliputi, pemahaman, tanggapan dan dukungan terhadap program
3. Penerapan program yang meliputi, sosialisasi program, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Manajemen yang baik, dapat menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Dalam pelaksanaan program PMKS terhadap Anak Jalanan dan Anak terlantar ini, sebuah manajemen pelaksanaan sangat penting guna menuju kesuksesan. Manajemen dalam pelaksanaan program PMKS meliputi:

1. Organisasi pelaksanaan, dan didalamnya terdapat pembagian tugas, desentralisasi wewenang
2. Interpretasi program yang meliputi, pemahaman, tanggapan dan dukungan terhadap program
3. Penerapan program yang meliputi, sosialisasi program, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian “**Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu**”, maka dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut:

1. Secara umum manajemen pelaksanaan program PMKS sudah baik, dengan dibuktikannya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, desentralisasi wewenang yang sangat jelas, berkoordinasi dengan organisasi serta instansi lain yang dapat memicu kerja sama yang efektif dan efisien.

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab tidak dilakukan dengan sederhana, dengan melalui Seleksi dan Sertifikasi Pekerja Sosial Perlindungan Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pemantapan. Sertifikasi dilakukan untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dibidangnya masing-masing. Jadi pembagian tugasnya jelas berdasarkan skill masing-masing individu.
3. Pemahaman terhadap pelaksanaan program walaupun setiap individu berbeda, akan tetapi memiliki arti yang sama. Dengan kata lain pihak panitia pelaksanaan program sudah mengerti atas pemahamannya.
4. Proses pelaksanaannya dilapangan pada umumnya telah melalui proses yang baik, baik koordinasi dengan organisasi, relawan masyarakat serta instansi terkait, tetapi dalam implementasi belum banyak program yang dapat direalisasikan karena minimnya dana. Dan juga kenyataan yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan proses-proses yang sudah diatur atau direncanakan untuk program tersebut. Itu dapat dilihat dengan hanya satu program saja yang dilakukan yaitu melakukan penertiban. Dan juga sosialisasi program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini tidak didapatkan oleh penerima layanan. Tidak ada layanan kebutuhan dasar berupa bantuan materi melainkan hanya penertiban dan pemberian nasehat.
5. Proses monitoring dan evaluasi yang sudah baik dengan cara dilakukan oleh panitia pelaksana yang dipegang penuh oleh Seksi Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Monitoring dilakukan dengan cara mencatat, memantau, menyelesaikan masalah yang terjadi saat pelaksanaan program berlangsung. Evaluasi terhadap program yang dilakukan oleh pihak pelaksana dengan cara masing-masing sub bagian diwajibkan menyerahkan laporan kegiatan yang berisikan pelaksanaan dilapangan, ketepatan sasaran,

waktu distribusi, jumlah bantuan, target fungsional, dokumentasi progres, ketepatan penggunaan alokasi dana dan penyelesaian masalah jika ada kesalahan.. Akan tetapi lagi-lagi prakteknya dilapangan sangat buruk dengan terbukti bahwa tidak semua kegiatan terlaksana. Jika saja pengawasan terhadap pelaksanaan program itu baik, maka tidak akan mungkin pula program tersebut akan berjalan dengan baik pula sesuai dengan tujuan utama program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar.

6.2 Saran

Setelah melakukan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang ada tentang **“Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu”**, maka hasil dari penelitian perlu disarankan sebagai berikut :

1. Program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ditujukan untuk mensejahterakan anak dan menjamin masa depannya, sekiranya akan lebih baik jika program tersebut bukan dimulai dari pihak Dinas atau pemerintah, tetapi dimulai dari kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan dan penjagaan kepada anak-anaknya.
2. Pihak pemerintah akan lebih baik jika pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan cara berkelanjutan
3. Perlu adanya media dan perencanaan pembangunan Kota Bengkulu kepada masyarakat umum sehingga adanya semangat dan motivasi yang menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. Diharapkan pelaksanaan atau sosialisasi program dapat terlaksanakan semua agar sasaran yang ditentukan mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya

5. Dan diharapkan juga kepada Dinas Sosial atau panitia pelaksanaan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini jangan hanya diprencanaan saja yang baik, teratur dan sistematis, tetapi penerapannya juga harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program, tepat sasaran dan benar-benar dilakukan
6. Meningkatkan kesadaran agar menunjang peningkatan dalam kerjasama pelaksanaan program PMKS

Saran diatas paling tidak dapat diajukan acuan ke depan baik bagi Pemerintah Kota terutama Dinas Sosial Kota Bengkulu maupun masyarakat, sehingga dapat mempertahankan apa yang sudah ada dan memperbaiki kekurangan dan yang belum terlaksana selama ini demi kebaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ertanto, Kirik. 1999. *Anak jalanan dan Subkultur: Sebuah Pemikiran Awal*, Yogyakarta, Lembaga Indonesia Perancis.
- Ferra, 2011. *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK 3) di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Usaha Padang Pelawi Kabupaten Seluma*. Bengkulu, Fisip Unib 2011
- Goode, William J. 1985. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 210.
- Howlett, Michael dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press.
- Inu Kencana Syafie, 2001:147, *Kebijakan Publik, 2001*
- Lestari, S dan Karyani, U. 1997. *Anak Jalanan Permasalahan dan Penangannya. Jurnal Psikologi, No. 3 Vol. 15/ No. 2/2000*, 180-195 Surakarta : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyadi, Seto. 2008. *Anak Jalanan. Jurnal Psikologi No. 1 Surakarta* : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia , (Jakarta: Bumi Aksara, 2003 : 143)
- Novalia Fitria, 1997. *Efektifitas pemberdayaan anak perempuan jalanan untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Indonesia*
- RM Ksatria Bhumi Persada, 2012. *Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu Dalam Ruang Publik*. Depok, Fisip UI 2012
- Slamet, Yulius. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: BPK FISIP UNS.
- Soedarsono. 1995. *Kenakalan Remaja, Revensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Subarsono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Wibowo, SE., M.Phil, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winroso & Salahudin, 1997 (www.google.com anak perempuan jalanan)

Sumber Lain

Data Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bengkulu, 2009): *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2010 dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI.

Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2000:2-4)

Departemen Sosial, 2001:23-24

Direktorat PSA 2008, Departemen Sosial RI

Draf Pedoman Operasional PKSA (Penyandang Kesejahteraan Anak), 2010.

<http://database.depsos.go.id/modules.php?name=Siks>

<http://dinkesos.babelprov.go.id/node/826>

http://dinsos.jatimprov.go.id/siks/DATA_PMKS_TERBARU2011.pdf

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/06/230000-anak-jalanan-di-indonesia/>

<http://www.dinsoslampung.web.id/jenis-definisi-dan-kriteria-pmks-a-psks>

<http://www.kemsos.go.id/users/wendy/pdf/spm-sosial/NSPK-PMKS-PSKS-PERMENSOS-No-08--2012.pdf>

<http://www.tempo.co/topik/masalah/2251/Anak-jalanan>

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta, Indonesia (2007)

Pelayanan & Rehabilitasi Sosial. Sumber: Data Direktorat PSA 2008, Departemen Sosial RI

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat :

1. Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?
2. Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?
3. Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?
4. Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?
5. Bagaimana cara pembagian tugas?
6. Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?
7. Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?
8. Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?
9. Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?
10. Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

HASIL WAWANCARA

Responden : 1

Umur : 39

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

Program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar itu lebih tepatnya disebut PKSA atau penyandang kesejahteraan sosial anak. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, bermain seperti anak biasanya. PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini bertujuan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar dapat terjamin sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu bermain, berkembang dan tumbuh sebagaimana anak-anak lainnya. Nah peran tersebut dapat dilakukan mulai dari keluarga, kerabat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Pemahaman panitia terhadap pelaksanaan program ini sangat baik dan sangat antusias, dikarenakan program ini bersifat saling membantu diantara kita.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Kalau akses dari luar itu ada ya, seperti LSM, ormas (organisasi Masyarakat). Dan disini kami juga dibantu oleh pihak Satpol PP didalam pelaksanaannya dilapangan

- *Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?*

Jika ditanyakan tanggapan dari instansi yang terkait dari luar Dinas Sosial, kebanyakan tanggapan positif datang dari LSM yah, yah mungkin karena LSM tersebut juga mendapatkan bantuan dana atau yang lainnya.

- *Bagaimana cara pembagian tugas?*

Masalah pembagian tugas itu biasanya dilakukan oleh salah satu bidang kami yaitu Bidang Perencanaan. Disini bidang perencanaan melakukan semuanya yang dibutuhkan sebelum kita terjun kelapangan. Untuk lebih jelasnya silahkan anda tanyakan ke bagian Bidang Perencanaan.

- *Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?*

Wewenang penuh dari program ini berada pada Dinas kita sendiri yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- *Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?*

Pelaksana dilapangan ini ya semua yang terlibat, seperti panitia dari Dinas, LSM ataupun Ormas

- *Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?*

Kalau soal prosesnya dilapangan saya kurang tahu dikarenakan saya jarang ikut kelapangan

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Disini pengawasan atau monitoringnya dilakukan dilapangan, lalu dibuat laporan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing tim koordinasi. Kesalahan itu pasti ada, paling kita hanya mengkoreksi ulang lalu memberi teguran kepada individu atau tim yang melakukan kesalahan.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Jika ditanyakan sudah tercapai atau belum itu susah, karena pelaksanaan program kami ini berhasil tetapi jumlah anak jalanan terkadang selalu bertambah. Terkadang juga mereka datang dari luar kota lalu menjadi anak jalanan disini. Jadi anak jalanan ini gak habis-habis.

HASIL WAWANCARA

Responden : 2

Umur : 44

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini diadakan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar kedepannya dapat terjamin. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan atas Undang-undang tadi dan juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan ada juga disini menyangkut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Pemahaman kita selaku panitia nantinya baik dan sangat paham.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Akses dari luar yang ada paling LSM.

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Tanggapan instansi yang terkait disini terkadang hanya tanggapan sebatas tugas. Ada yang menanggapi dengan baik dan ada juga yang buruk.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pelaksana PMKS adalah Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dinas Sosial Provinsi mengkoordinasikan Dinas Sosial Kota/Kabupaten dalam pelaksanaannya. Pembagian tugas kami dilakukan oleh bagian Bidang Perencanaan. Itu saja.

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Wewenang penuh yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu karena yang mengadakan dan melaksanakannya kan Dinas Sosial, maka wewenang ya jelas dipegang oleh Kadis.

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?
Semuanya, termasuk instansi yang terkait seperti LSM, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak.

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Pelaksanaan dilapangan sudah ada tugasnya masing-masing.

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Pelaporan dan monitoring dilakukan berdasarkan pemabgian wewenang masing-masing tim. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seksi monitoring dan evaluasi sendiri. Kadang hanya diberi teguran saja bila ada yang salah lalu dibenarkan secepatnya. Biasanya laporan itu selesainya kurang lebih 2 bulan.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Sudah, tapi perasaan saya anak jalanan dan anak terlantar ini ga habis-habis

HASIL WAWANCARA

Responden : 3

Umur : 44

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini adalah program yang tujuannya terbangunnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan upaya perlindungan, melalui penguatan kemampuan keluarga dalam memenuhi hak anak, mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga anak dapat menikmati kehidupan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Pemahaman panitia terhadap pelaksanaan program ini sangat baik dan sangat antusias, dikarenakan program ini sudah sering kita laksanakan.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Akses dari luar seperti LSM. Dan disini kami juga dibantu oleh pihak Satpol PP didalam pelaksanaannya dilapangan. Karena terkadang jika kami melakukan penertiban kebanyakan anak jalanan dan anak terlantar ini membangkang.

- **Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?**

Baik. Instansi yang terkait tersebut ingin ikut serta dalam pelaksanaanya

- **Bagaimana cara pembagian tugas?**

Pembagian tugas sebelumnya calon panitia diberikan pelatihan sebelum terjun kelapangan.

Setelah itu panitia yang sudah diberikan pelatihan diberikan tugas masing-masing berdasarkan hasil sertifikasi pelatihan tadi. Tujuan pelatihan tadi agar mengetahui kualifikasi dan kompetensi panitia pelaksana sebagai pekerja sosial.

- **Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?**

Wewenang penuh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- **Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?**

Semua terlibat, terutama panitia, LSM, Ormas, Sukarelawan

- **Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?**

Pelaksanaannya dilapangan kami bekerjasama dengan Satpol PP yang menertibkan anak jalanan dan anak terlantar tersebut lalu didata. Bagi anak jalanan dan anak terlantar yang mempunyai keluarga, langsung kami antar kepada keluarganya, jika tidak mempunyai keluarga maka kami membawa ke Dinas Sosial untuk kami berikan arahan dan kadang kami beri bantuan berupa materi dan makanan.

- **Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?**

Bentuk kegiatan monitoring pada setiap sub program, pada umumnya meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah. Tujuannya agar dapat dipastikan pelaksanaan program tepat sasaran, tepat waktu distribusi, tepat jumlah bantuan dan tercapainya target fungsional. Setiap tim monitoring wajib membuat laporan kepada Dinas paling sedikit 2 kali dalam setahun.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Menurut saya sudah. Tetapi udah ga lagi, mungkin juga udah jarang sekali dilaksanakan

HASIL WAWANCARA

Responden : 4

Umur : 34

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini adalah program yang ditujukan untuk anak agar dapat menikmati kehidupan yang layak, baik dan sejahtera serta untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Baik dan dapat dipahami

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Sering LSM dan Dinas Perlindungan Anak

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Baik.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pembagian tugas dilakukan berdasarkan skill dan keahlian bidangnya masing-masing. Pemilihan pekerja atau pemberian tugas berdasarkan Seleksi dan Sertifikasi Pekerja Sosial Perlindungan Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Bimbingan dan Pemantapan. Sertifikasi dilakukan untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dibidangnya masing-masing.

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Wewenang penuh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Semua panitia pelaksanaan

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Kami melakukan penertiban anak jalanan dan anak terlantar tersebut lalu kami catat atau didata. Bagi anak jalanan dan anak terlantar yang mempunyai keluarga, langsung kami antar kepada keluarganya, jika tidak mempunyai keluarga maka kami membawa ke Dinas Sosial untuk kami berikan arahan. Bantuan sosial kami berikan dengan tujuan agar anak terlantar dan anak jalanan dapat terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak tersebut meliputi yang pertama, kebutuhan dasar dalam bentuk pemberian layanan kebutuhan nutrisi atau gizi. Kedua yaitu layanan kesiapan belajar seperti mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki kembali sistem pendidikan. Yang ketiga adalah, pelatihan ketrampilan.

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara masing-masing bagian menyerahkan laporan, laporan tersebut didapat dengan cara mengamati, melihat dan mencatat berbagai kegiatan,

waktu, dana anggaran, sasaran dan manfaat. Monitoring dan evaluasi biasanya dikerjakan oleh seksi kita sendiri yaitu Seksi Monitoring dan Evaluasi. Kesalahan didalam pelaksanaan kegiatan hanya diberikan teguran dan diberikan arahan agar memperbaiki kesalahan yang ada.

- *Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?*

Menurut saya sudah. Tapi seperti yang kita lihat, anak jalanan dan anak terlantar ga pernah habis.

HASIL WAWANCARA

Responden : 5

Umur : 41

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini bertujuan agar kesejahteraan anak jalanan dan anak terlantar dapat terjamin.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Baik.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Ada, terkadang dari masyarakat atau relawan dan LSM

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Baik.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pembagian tugas dilakukan dengan cara sangat terinci dan teliti, agar para panitia pelaksanaan dapat menopang tanggung jawabnya dan tugasnya masing-masing.

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Dinas Sosial Kota Bengkulu. Karena program PMKS ini adalah program instansi atau program Dinas

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Semua panitia pelaksana terlibat

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Proses pelaksanaannya dilapangan berjalan dengan baik, proses dilapangan dimulai dari pengumpulan data, lalu panitia yang bertugas dilapangan segera melakukan sosialisasi kegiatan dibantu Satpo PP seperti penertiban, pemberian arahan, penyuluhan dan pemberian bantuan sosial. Disamping itu dengan serentak tim pengawas melakukan monitoring dan pencatatan dan membuat laporan yang akan diserahkan ke Dinas Sosial.

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Panitia yang melakukan monitoring ini ikut terus dimana kegiatan itu berlangsung. Semua itu termasuk memonitoring kegiatan yang berlangsung, kejadian-kejadian didalam pelaksanaan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tim monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Seksi Monitoring dan evaluasi.

Nah jika ada kesalahan dari panitia, biasanya hanya diberikan teguran lisan.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Sudah.

HASIL WAWANCARA

Responden : 6

Umur : 30

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/Tanggal : jum'at/ 21 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS adalah Penyandang Kesejahteraan Sosial. Didalam PMKS ini terdapat berbagai macam kegiatan, diantaranya PMKS untuk Anak Jalanan dan Anak Terlantar. Tujuannya agar anak jalanan dan anak terlantar tersebut dapat menikmati kehidupan yang layak, terjamin, tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Ada yang menanggapi dengan baik ada juga yang tidak. Nah yang tidak ini bukannya tidak mengerti, tetapi terkadang malas terlibat dalam pelaksanaan program.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Ada, seperti Dinas Perlindungan Anak itu

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Baik.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pembagian tugas melalui seleksi yang ketat dan panitia yang terpilih sudah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi agar kita bisa menentukan kualitas individu tersebut berdasarkan tugas dan wewenang yang akan dipegangnya

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Semua panitia pelaksana terlibat

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Pelaksanaan dilapangan sejauh kami telah melaksanakan kegiatan ini ya lancar-lancar saja. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, mulai dari survei, observasi, mengumpulkan data melalui panitia, LSM, dan relawan. Data tersebut dikumpulkan lalu dibukukan. Setelah itu menyerahkan data ke Kemensos dan memulai pelaksanaan dilapangan. Dengan cara penertiban, pemulangan kepada keluarga, dan peberian bantuan. Dan yang terakhir monitoring dan pelaporan.

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Dengan cara melakukan pengawasan sebagaimana kewenangan mereka masing-masing. Monitoring setiap program berbeda-beda, dan monitoring yang dilakukan panitia dengan cara pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah. Kesalahan yang terjadi biasanya

hanya diberikan teguran keras secara lisan dan secara tertulis jika teguran lisan tidak didengarkan.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Bisa sudah bisa belum. Karena kita melihat anak jalanan dan anak terlantar ini selalu berdatangan dari dalam kota maupun luar kota.

HASIL WAWANCARA

Responden : 7

Umur : 33

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/Tanggal : jum'at/ 21 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar ini adalah program yang kami laksanakan agar anak jalanan dan anak terlantar mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan visi dan misi kami yaitu terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang baik dan manusiawi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Kalau saya pribadi sih kurang, karena kegiatan ini tidak menghasilkan uang tapi malah menghabiskan APBN kita, sedangkan anak jalanan dan anak terlantar tidak habis-habis.

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Ada seperti Dinas Perlindungan Anak, LSM

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Baik.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pembagian tugas sesuai dengan prosedur yang ada, pembagian tugas biasanya kami melakukan pelatihan terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa menentukan tugas masing-masing panitia pelaksana.

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Semua panitia pelaksana

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Pelaksanaan dilapangan itu kami laksanakan setelah data telah terkumpul, panitia pun sudah siap. Lalu melaksanakan kegiatan seperti pemberian bantuan dan lain-lain.

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Monitoring dilakukan secara umum, seperti mencatat, memantau, menyelesaikan masalah ketika pelaksanaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seksi kita seperti Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Sudah.

HASIL WAWANCARA

Responden : 8

Umur : 40

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin / 24 Juni 2013

Tempat : Dinas Sosial Kota

Hasil Wawancara :

- Apa itu program PMKS terhadap anak jalanan dan anak terlantar?

PMKS anak jalanan dan anak terlantar itu adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada pada anak jalanan dan anak terlantar. Tujuannya agar anak jalanan dan anak terlantar ini dapat menikmati kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang dengan baik.

- Bagaimana pemahaman panitia pelaksanaan program terhadap program yang akan dilaksanakan?

Cukup baik

- Apakah ada akses dari luar sebagai upaya dukungan terhadap pelaksanaan program?

Kami sering bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak

- Bagaimanakah tanggapan instansi terkait dan dukungannya?

Baik.

- Bagaimana cara pembagian tugas?

Pembagian tugas, pertama pihak Dinas memberikan pelatihan kepada calon panitia pelaksana dilapangan, setelah itu mendapat sertifikasi agar dapat menentukan tugas masing-masing. Persiapan itu dilakukan oleh Bidang Perencanaan, begitupun pembagian tugasnya.

- Berada ditangan siapakah wewenang penuh terhadap program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Dinas Sosial Kota Bengkulu.

- Siapa saja pelayan atau pelaksana dilapangan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar?

Semua panitia pelaksana

- Bagaimanakah proses pelaksanaannya dilapangan?

Kita mulai dari tahapan pertama yaitu:

- 1. Penyusunan manual dan instrumen meliputi pedoman, prosedur dan kriteria*
- 2. Pengumpulan data*
- 3. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran, kegiatan ini melalui rapat kerja*
- 4. Penentuan panitia dan pembagian tugas, dimulai dari pemberian pelatihan dan seleksi, sertifikasi yang didapat digunakan untuk menentukan kualifikasi yang sesuai dibidang penyelenggaraan*
- 5. Pelaksanaan dilapangan seperti penyuluhan dukungan keluarga, pembinaan, dan bantuan sosial*
- 6. Supervisi, monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan berjalan lancar*

- Bagaimana cara panitia pelaksanaan melakukan monitoring? Dan jika ada kesalahan bagaimanakah cara penanganannya?

Monitoring dilakukan dengan cara mencatat, memantau, menyelesaikan masalah.

Jika ada kesalahan hanya diberikan teguran dan diwajibkan memperbaiki.

- Apakah tujuan dari program PMKS anak jalanan dan anak terlantar ini sudah tercapai?

Sudah. Tetapi sekarang sudah jarang dilaksanakan

HASIL WAWANCARA

(Penerima Layanan)

Responden : 9

Umur : 8 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Senin / 7 Oktober 2013

Tempat : Simpang Lima

Hasil Wawancara :

- Apakah sering kamu dirazia atau ditangkap oleh Satpol PP?

Iya sering

- Hanya Satpol PP saja Atau bersama Polisi dan orang Dinas Sosial?

Satpol PP dan orang Dinas Sosial saja

- Sering dibawa kemana?

Ke Dinas Sosial

- Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

Tidak pernah

- Lalu kalian diberikan apa di Dinas Sosial?

Hanya dikasih tau supaya kami tidak minta-minta lagi dipinggir jalan

- Apakah kalian pernah diberikan pelayanan seperti pelatihan ketrampilan atau belajar seperti anak-anak disekolahan?

Tidak pernah

- Apakah kalian punya rumah dan orang tua?

Iya ada

HASIL WAWANCARA

(Penerima Layanan)

Responden : 10

Umur : 12 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/Tanggal : Senin / 7 Oktober 2013

Tempat : Simpang Lima

Hasil Wawancara :

- Apakah sering kamu dirazia atau ditangkap oleh Satpol PP?

Sering

- Hanya Satpol PP saja Atau bersama Polisi dan orang Dinas Sosial?

Satpol PP dan orang Dinas Sosial

- Sering dibawa kemana?

Ke Dinas Sosial

- Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

Tidak pernah kalau sekarang, tapi kalau dulu pernah dikasih makanan sama uang

- Lalu kalian diberikan apa sekarang di Dinas Sosial?

Hanya dikasih tau supaya kami tidak minta-minta lagi, kalau tidak kami akan ditangkap polisi kata orang Dinas Sosial

- Apakah kalian pernah diberikan pelayanan seperti pelatihan ketrampilan atau belajar seperti anak-anak disekolahan?

Tidak pernah

- Apakah kalian punya rumah dan orang tua?

Iya ada, di anggut

HASIL WAWANCARA

(Penerima Layanan)

Responden : 11

Umur : 10 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Senin / 7 Oktober 2013

Tempat : Simpang Lima

Hasil Wawancara :

- Apakah sering kamu dirazia atau ditangkap oleh Satpol PP?

Iya

- Hanya Satpol PP saja Atau bersama Polisi dan orang Dinas Sosial?

Satpol PP dan orang Dinas Sosial yang sering

- Sering dibawa kemana?

Ke Dinas Sosial

- Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

Tidak pernah

- Lalu kalian diberikan apa di Dinas Sosial?

Cuma dibilangi jangan minta-minta

- Apakah kalian pernah diberikan pelayanan seperti pelatihan ketrampilan atau belajar seperti anak-anak disekolahan?

Tidak pernah

- Apakah kalian punya rumah dan orang tua?

Iya ada

HASIL WAWANCARA

(Penerima Layanan)

Responden : 12

Umur : 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Senin / 7 Oktober 2013

Tempat : Simpang Lima

Hasil Wawancara :

- Apakah sering kamu dirazia atau ditangkap oleh Satpol PP?

Iya sering

- Hanya Satpol PP saja Atau bersama Polisi dan orang Dinas Sosial?

Satpol PP dan orang Dinas Sosial

- Sering dibawa kemana?

Ke Dinas Sosial

- Di Dinas Sosial kalian diberikan apa? Apakah diberikan makanan, uang atau pakaian?

Tidak pernah, tapi pernah dikasih nasi sama uang

- Lalu kalian diberikan apa sekarang di Dinas Sosial?

Cuma ceramah, jangan minta-minta lagi

- Apakah kalian pernah diberikan pelayanan seperti pelatihan ketrampilan atau belajar seperti anak-anak disekolahan?

Tidak pernah

- Apakah kalian punya rumah dan orang tua?

Ada

LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 1



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 2



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 3



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 4



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 5



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 6



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 7



LAMPIRAN FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 8



LAMPIRAN FOTO SAAT OBSERVASI TERHADAP PENERIMA PELAYANAN PMKS

(ANAK JALANAN DAN ANAK TERLANTAR)



LAMPIRAN FOTO SAAT OBSERVASI KETIKA PROGRAM LAYANAN PMKS

BERLANGSUNG

(ANAK JALANAN DAN ANAK TERLANTAR)



LAMPIRAN FOTO SAAT OBSERVASI KETIKA PROGRAM LAYANAN PMKS

BERLANGSUNG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Liman Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 21058
Laman : <http://fisip.unib.ac.id> e-mail : rektorat@unib.ac.id

Nomor : 2296 /UN30.5/PP/2013
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

29 Mei 2013

Yth. Kepala Dinas Sosial
Kota Bengkulu.

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang berikut :

Nama : Indra Gunawan
IPM : D1D008046
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara

berencana melakukan penelitian untuk Skripsi dengan judul : Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu.

lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memberikan Izin Penelitian bagi mahasiswa tersebut.

Sebagai perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n.Dekan,
Pembantu Dekan Bid. Akademik





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/34 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB). Nomor : 2076/UN30.5/PP/2013, Tanggal 16 Mei 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Nama / NPM : Indra Gunawan / D1D008046
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 20 Mei 2013 s/d 20 Agustus 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)

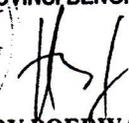
Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bengkulu, 20 Mei 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU


Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 345 / 11 / BPPT / 2013

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 26 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/341/KP2T/2013 Tanggal 20 Mei 2013.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NPM : Indra Gunawan / D1D008046
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 20 Mei 2013 s/d 20 Agustus 2013
Penanggung Jawab Dengan Ketentuan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 22 Mei 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU



Drs. BAKHSIR, MM

Pembina Tk. I Nip. 19580515 198003 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU

Jalan. Let. Kol. Santoso No. 47 Bengkulu 38221 Telepon (0736) 21044

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 315 /D.Sos/2013

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :

- Nama : Indra Gunawan
- NPM : D1D008046
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Fakultas : Fisipol Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Nomor 2296/UN30.5/PP/2013 tanggal 29 Mei 2013, Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/341/KP2T/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor : 070/345/BPPT/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk skripsinya yang berjudul *"Implementasi Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu "*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 Mei 2013
An. Kepala Dinas Sosial
Kota Bengkulu
Sekretaris



ADAMERI EFENDY, S.Sos
Pembina /NIP. 19691003 198703 1 003